



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan wali yang diajukan oleh :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Puskesmas Togo-togo, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 7 Mei 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2018/PA.Jnp tanggal 7 Mei 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pernah terikat perkawinan dengan laki-laki Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/4/VIII/2007, tertanggal 4 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan laki-laki Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Aril Saputra Alim bin Alimuddin, S.Sos, umur 10 tahun.
3. Bahwa laki-laki Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2011 karena sakit.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin adalah seorang anggota Polri, Kabupaten Jeneponto dan pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri ([REDACTED]) dan seorang anak (Muh. Aril Saputra Alim bin Alimuddin, S.Sos) dan meninggalkan gaji pensiun untuk istri dan anak hasil perkawinan dengan pemohon Hasbiah, S.Kep, Ns binti Dewa.
5. Bahwa berhubung pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki Kafrawi K bin H. Karim dan sudah tidak berhak menerima tunjangan istri dari gaji pensiun almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin, sedangkan anak hasil perkawinan pemohon dengan almarhum masih dibawah umur.
6. Bahwa pemohon sebagai ibu dari anaknya mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjadi wali pengampu terhadap anak yang ditinggalkan almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin hingga anak tersebut dewasa dan cakap.
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan sebagai wali pengampu untuk dipergunakan dalam pengurusan tunjangan anak dari gaji pensiunan almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin kepada pemohon.
8. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon, [REDACTED], sebagai wali pengampu dari Muh. Aril Saputra Alim bin Alimuddin, S.Sos.

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar tidak meneruskan perkaranya karena pemohon adalah orang tua dari anak yang masih belum dewasa sehingga tidak perlu menetapkan pemohon sebagai wali karena secara otomatis pemohon yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang belum dewasa, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakan permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 142/4/VIII/2007, tanggal 4 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberikan meterai secukupnya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Muh. Aril Saputra Alim Nomor 73.04.AL.2008.2373 tanggal 31 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberikan meterai secukupnya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P2.

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7304093107080002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KKB, tanggal 31 Juli 2008, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberikan meterai secukupnya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P3.

4. Fotokopi surat keterangan meninggal atas nama Alimuddin dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bidang Kedokteran Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Mappa Oudang, tanggal 27 Desember 2011, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberikan meterai secukupnya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P4.

5. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tentang Pemberian Pensiun Warakawuri Mantan Anggota Polri Nomor Kep/205/IV/2012, tanggal 30 April 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberikan meterai secukupnya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P5.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan guru honorer pada TK Pertiwi Jeneponto, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Jeneponto, hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah ipar pemohon dari suaminya yang pertama bernama Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin.
- Bahwa pemohon dengan suaminya yang terdahulu (Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin) telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Aril Saputra Alim, sekarang anak tersebut duduk di kelas IV Sekolah Dasar.



- Bahwa suami pemohon (Alimuddin S.Sos. bin H. Syarifuddin) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2011 karena sakit.
 - Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Alimuddin S.Sos. bin H. Syarifuddin) adalah seorang anggota Polri yang setiap bulannya memperoleh gaji, pemohon beserta anak pemohon yang bernama Muh. Aril Saputra Alim juga memperoleh tunjangan sebagai istri dan anak dari almarhum Alimuddin.
 - Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Kafrawi K bin H. Karim sehingga pemohon sudah tidak berhak memperoleh tunjangan istri dari almarhum Alimuddin.
 - Bahwa anak pemohon dengan almarhum Alimuddin yang bernama Muh. Aril Saputra Alim, sekarang masih berada di bawah umur.
 - Bahwa sepeninggal almarhum Alimuddin, Muh. Aril Saputra Alim tetap berada dalam pengasuhan pemohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak pemohon, pemohon berkelakuan baik dan memelihara anaknya dengan sebaik-baiknya, pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon tidak pernah dicabut hak kekuasaannya terhadap anaknya.
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan tunjangan anak pemohon dengan Alimuddin dari gaji pensiunan almarhum Alimuddin karena anak tersebut masih di bawah umur.
2. [REDACTED], umur 39, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Jeneponto, hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah ipar pemohon dari suaminya yang pertama bernama Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin.
- Bahwa pemohon dengan suaminya yang terdahulu (Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin) telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Aril Saputra Alim, sekarang anak tersebut duduk di kelas IV Sekolah Dasar.
- Bahwa suami pemohon (Alimuddin S.Sos. bin H. Syarifuddin) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2011 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Alimuddin S.Sos. bin H. Syarifuddin) adalah seorang anggota Polri yang setiap bulannya memperoleh gaji, pemohon beserta anak pemohon yang bernama Muh. Aril Saputra Alim juga memperoleh tunjangan sebagai istri dan anak dari almarhum Alimuddin.
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Kafrawi K bin H. Karim sehingga pemohon sudah tidak berhak memperoleh tunjangan istri dari almarhum Alimuddin.
- Bahwa anak pemohon dengan almarhum Alimuddin yang bernama Muh. Aril Saputra Alim, sekarang masih berada di bawah umur.
- Bahwa sepeninggal almarhum Alimuddin, Muh. Aril Saputra Alim tetap berada dalam pengasuhan pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak pemohon, pemohon berkelakuan baik dan memelihara anaknya dengan sebaik-baiknya, pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tidak pernah dicabut hak kekuasaannya terhadap anaknya.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan tunjangan anak pemohon dengan Alimuddin dari gaji pensiunan almarhum Alimuddin karena anak tersebut masih di bawah umur.

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara perwalian yang diajukan oleh pemohon termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana Ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 109 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena pemohon adalah warga Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar tidak meneruskan perkaranya karena pemohon adalah orang tua dari anak yang masih belum dewasa sehingga tidak perlu menetapkan pemohon sebagai wali karena secara otomatis pemohon mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak pemohon yang belum dewasa, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya pemohon mendalilkan agar pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak pemohon dengan suaminya yang terdahulu bernama Alimuddin S.Sos., bin H. Syarifuddin karena suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2011 sedangkan Alimuddin semasa hidupnya

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



adalah seorang anggota Polri yang menerima gaji akan tetapi sekarang pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili pengambilan gaji terhadap anak pemohon yang bernama Muh. Aril Saputra Alim, karena anak tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 10 tahun.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai P.5., yang akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang merupakan kutipan akta nikah menerangkan bahwa pemohon adalah merupakan istri dari Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin, dengan demikian telah terbukti pemohon adalah istri dari Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta kelahiran atas nama Muh. Aril Saputra Alim, telah terbukti Muh. Aril Saputra Alim adalah anak dari pemohon sebagai ibunya dan Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin adalah ayahnya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang merupakan kartu keluarga atas nama Alimuddin, S.Sos. adalah merupakan kepala keluarga dan pemohon beserta anaknya adalah merupakan anggota keluarga dari Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang merupakan surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara, menerangkan bahwa Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan keputusan kepala kepolisian daerah Sulawesi Selatan tentang pemberian pensiun warakawuri mantan anggota polri kepada pemohon, menerangkan bahwa pemohon dan anaknya memperoleh tunjangan dari suaminya yang telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P3 dan bukti P5 adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



sehingga merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti pemohon adalah istri dari almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin seorang anggota polisi dan mempunyai anak bernama Muh. Aril Saputra Alim yang mana pemohon dan anaknya mendapat gaji dan tunjangan dari Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 merupakan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kepala Rumah Sakit bukan merupakan akta autentik namun merupakan akta di bawah tangan karena untuk membuktikan kematian seseorang dibutuhkan akta kematian yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P4 merupakan akta di bawah tangan akan tetapi berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata bukti tersebut tetap dapat diterima sebagai alat bukti dalam hal ini sebagai bukti permulaan karena belum memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat sehingga harus didukung oleh alat bukti lain agar kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Kasmawati, S.Pd binti Sapi dan Nurmiati binti Sapi, kedua saksi tersebut adalah ipar pemohon dari suami pemohon yang terdahulu yaitu Alimuddin, S.Sos., bin H. Syarifuddin, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, kedua saksi diperiksa satu persatu, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R. Bg., sehingga keterangan keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, keduanya mengetahui pemohon telah menikah dengan Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muh. Aril Saputra Alim, sekarang anak tersebut duduk dibangku kelas IV SD.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, suami pemohon (Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2011 dan semasa hidupnya almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin adalah seorang anggota polisi dan menerima penghasilan setiap bulan dari gajinya sebagai anggota polisi.

Menimbang, bahwa mengenai kematian suami pemohon yang diketahui oleh dua orang saksi telah melengkapi alat bukti P4 yang merupakan bukti permulaan sehingga bukti P4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kekuatan pembuktian bukti P4 menjadi sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sekarang pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain namun anak pemohon tetap tinggal bersama pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat termohon berkata kasar dan berbuat kasar kepada Muh. Aril Saputra Alim, pemohon adalah orang yang baik serta bertanggung jawab kepada anak pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak pemohon yang bernama Muh. Aril Saputra Alim untuk mengambil gaji anak pemohon karena anak pemohon masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon majelis hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



dan saling mendukung satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin pada tanggal 1 Agustus 2007.
- Bahwa dalam perkawinannya pemohon dengan Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Aril Saputra Alim, lahir tanggal 18 Mei 2008.
- Bahwa Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2011.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin adalah seorang anggota polri yang menerima gaji setiap bulan dan yang menjadi tanggungan adalah pemohon dan anak pemohon.
- Bahwa sekarang pemohon telah menikah dengan laki-laki lain sehingga pemohon sudah keluar dari daftar gaji almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin sedangkan anak pemohon tetap dalam tanggungan almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin.
- Bahwa sejak almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin meninggal dunia anak pemohon tetap dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya serta tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak pemohon, serta tidak pernah dicabut perwaliannya.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak pemohon untuk memperoleh tunjangan gaji terhadap anak pemohon yang bernama Muh. Aril Saputra Alim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Muh. Aril Saputra Alim, umur 10 tahun dari perkawinannya dengan almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin, semasa hidupnya almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin adalah seorang anggota polri yang menerima gaji

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



setiap bulan yang mana pemohon dan anaknya menerima tunjangan gaji akan tetapi setelah pemohon menikah lagi dengan laki-laki lain, pemohon sudah tidak terdaftar sebagai penerima gaji pensiun janda dari almarhum Alimuddin, S.Sos, bin H. Syarifuddin namun anak pemohon masih memperoleh gaji dari almarhum akan tetapi karena usia anak pemohon dengan almarhum Alimuddin, S.Sos. bin H. Syarifuddin masih di bawah umur sehingga untuk memperoleh gajinya anak tersebut harus diwakilkan kepada pemohon namun pemohon terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut (Muh. Aril Saputra Alim).

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang berada di bawah umur yaitu belum berumur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan secara hukum dikategorikan belum cakap melakukan perbuatan hukum dan semestinya berada di bawah perwalian seseorang atau badan hukum, sebab karena jika membiarkan seorang anak tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, berarti sama saja dengan telah berbuat dzolim terhadap anak tersebut dan orang tua dalam hal ini ayah atau ibu kandung sebagai keluarga terdekat dari seorang anak secara otomatis adalah merupakan wali terhadap anaknya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan sendirinya orang tua bertindak untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada beberapa instansi tertentu untuk melakukan pengurusan administrasi baik hubungannya dengan

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



kepegawaian maupun keuangan dalam hal ini pengalihan gaji bagi anak di bawah umur yang mana ayah atau ibunya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI-POLRI yang telah meninggal dunia lebih dahulu, maka orang tua yang masih hidup menjadi wali terhadap anaknya yang di bawah umur sebagaimana yang dialami oleh pemohon dimana kantor tempat suami terdahulu pemohon (almarhum Alimuddin, S.Sos bin H. Syarifuddin) bekerja sebagai anggota Polri mensyaratkan pemohon sebagai orang tua yang masih hidup ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama Muh. Aril Saputra Alim untuk menerima gajinya setiap bulan karena anak tersebut masih di bawah umur dengan penetapan dari pengadilan agama, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, dimana dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama a quo Pengadilan Agama Jeneponto dapat saja menetapkan orang tua dari anak yang masih berada di bawah umur yaitu pemohon sebagai ibu kandung dari Muh. Aril Saputra Alim menjadi wali terhadap anaknya dalam hal pengurusan tunjangan anak dari gaji pensiunan ayah kandung dari Muh. Aril Saputra Alim yang telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa karena pemohon mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan anak yang dimintakan perwalian karena sebagai ibu kandung dan menurut keterangan kedua saksi, pemohon adalah merupakan orang yang berperangai baik serta bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak pemohon meskipun ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain namun anak pemohon tetap berada dalam pengasuhan pemohon bersama suaminya

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



yang sekarang, oleh karenanya syarat-syarat untuk menjadi seorang wali sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”. jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ayah atau ibu dapat menjadi wali terhadap anaknya selama kekuasaannya sebagai orang tua tidak pernah dicabut karena sebab dicabutnya kekuasaan orang tua ada dua keadaan yaitu orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali sedangkan pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang akan dimintakan perwalian, tidak pernah melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan kekuasaannya dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap anak pemohon bernama Muh. Aril Saputra Alim, umur 10 tahun, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya telah dikabulkan, maka pemohon dengan sendirinya dapat melakukan perbuatan hukum atas diri anaknya maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk mengurus administrasi tunjangan gaji anak pemohon bernama Muh. Aril Saputra Alim dari ayah kandung anak tersebut bernama Alimuddin, S.Sos bin H. Syarifuddin yang telah meninggal dunia dan urusan lain yang berhubungan dengan kepentingan anak pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan wali termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon, [REDACTED] sebagai wali terhadap anak yang bernama Muh. Aril Saputra Alim bin Alimuddin, S.Sos, umur 10 tahun.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp260.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)